

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Maryati, Ulfi dan Endrawati, 2010).

Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa

Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari Pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan (Mutiarah Maimunah, 2006).

Semakin tinggi tingkat investasi modal di harapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002).

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk

fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007).

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, perbaikan jalan umum dan lain-lain. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun Kabupaten/Kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 dan UU 32/2004 melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat draft/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Mala, Lilik Khoirul (2008) melakukan penelitian pada pemerintah kabupaten/ kota Jawa Tengah menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh signifikan kepada Belanja Modal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, sehingga permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi peneliti.

2. Untuk dijadikan informasi bagi pemerintah di Jawa Tengah dalam alokasi belanja modal.
3. Dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya baik dari kalangan mahasiswa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini yang merupakan laporan dari hasil penelitian direncanakan terdiri dari lima bab, yang masing-masing berisi tentang:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat teori-teori antara lain pengertian Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal, kerangka teoritis, penelitian terdahulu dan hipotesis.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Menjelaskan secara rinci dan jelas jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel operasional dan metode analisis data.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gambaran umum, deskripsi data, analisis data, pembahasan dan implikasi manajerial.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat.